



**PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN  
2024**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan Dr.Sutomo No 10 Kalongan Purwodadi Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi – Grobogan 58111,  
Telepon (0292) 5140756, Faksimile (0292) 422012

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730726 199803 2 006



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.





Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730726 199803 2 006





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	63
A. Pengukuran Kinerja	64
B. Capaian Kinerja Organisasi	65
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024	66
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.	69
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra	71
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten	80
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	81
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	84
7. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (Standar Pelayanan Minimal)	101
C. Realisasi Anggaran	120
BAB IV PENUTUP	123
LAMPIRAN	126
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	152
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	157



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999



tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;



- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



### 3. Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4. Bidang Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberian rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan



f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan standar, pedoman, kebijakan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan serta kawasan ibu kota

kecamatan, perencanaan teknis dan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang keahlian, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

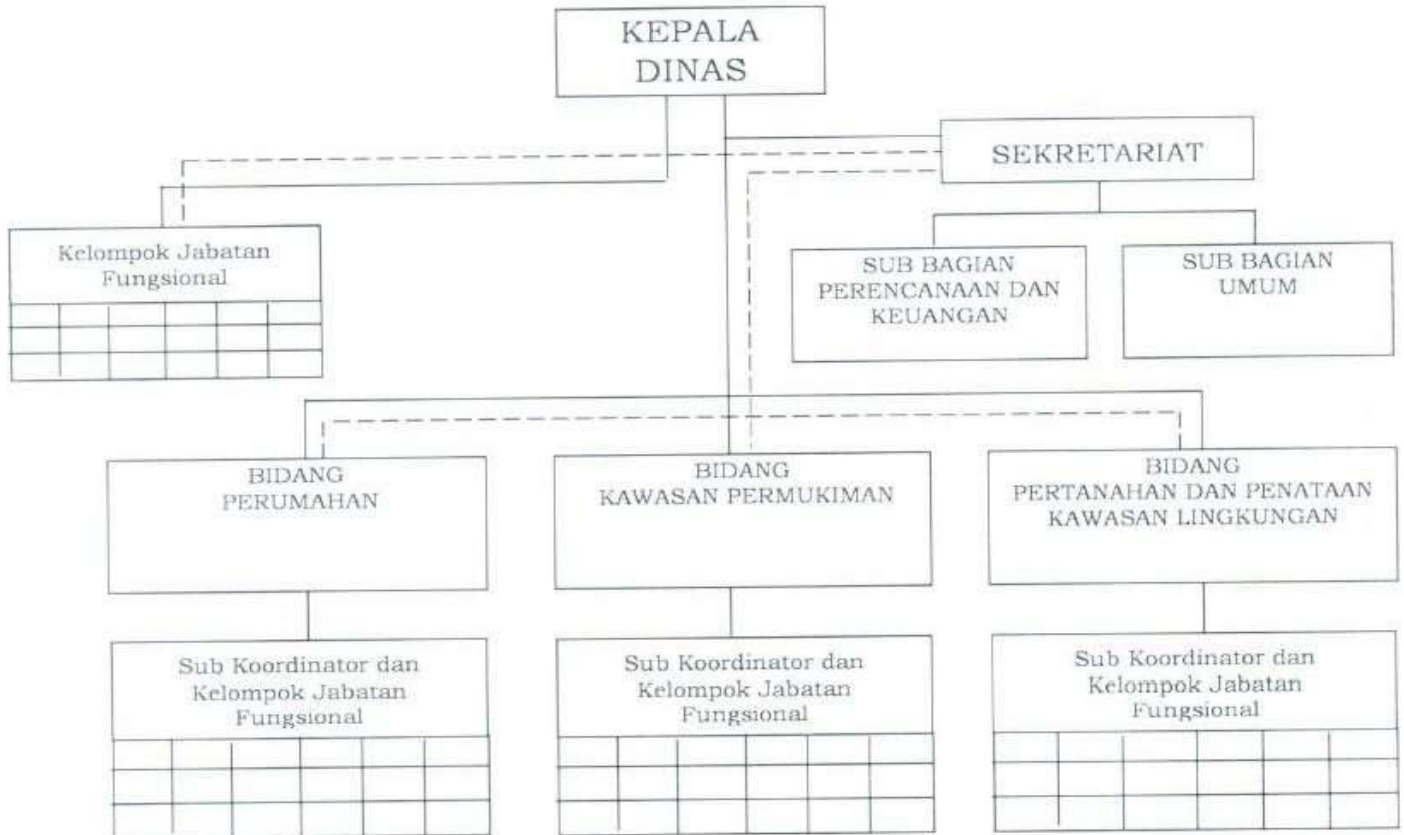
Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/ atau tim kerja, ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi dan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di Luar Dinas untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi



Struktur organisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan



### C. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.



## **1. Permasalahan Sekretariat**

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas, tidak ada staf teknis ASN, sebagian besar staf teknis merupakan Non ASN selain itu banyak pejabat ASN yang sudah purna tugas;
- b. Latar belakang pendidikan ASN kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama komputer, printer, scanner, gedung kantor dan kendaraan operasional baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua);
- d. Masih terdapat kesalahan dalam pencatatan aset daerah, terdapat aset yang seharusnya dikelola daerah menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaannya;
- e. Belum tersedianya sistem pengelolaan kepegawaian yang terjadwal;
- f. Pengelolaan arsip yang belum optimal karena belum ada depo arsip yang sesuai standart;
- g. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

## **2. Permasalahan Bidang Perumahan**

- a. Masih terdapat RTLH sebesar 37,12 % (146.184 unit) yang belum tertangani;
- b. Belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah;
- c. Ketergantungan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dan provinsi serta dana CSR swasta;
- d. Belum optimalnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan;
- e. Belum terlaksananya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.



### **3. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman**

- a. Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman;
- b. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan permukiman;
- c. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;
- d. Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan pemenuhan air bersih, terutama pada daerah rawan air bersih;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat;
- f. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih dan sanitasi;
- g. Sulitnya memperoleh sumber mata air di beberapa wilayah tertentu;
- h. Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
- i. Masih terdapat daerah rawan kekeringan yang belum terlayani air bersih.

### **4. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan**

- a. Banyaknya permintaan fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk digunakan sebagai hunian "liar";
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah;
- d. Banyak tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah belum bersertifikat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :



1. Masih terdapat rumah layak huni yang belum tertangani sebanyak 146.184 unit (37,12);
2. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK Bupati Grobogan No 050/921/2020;
3. Belum optimalnya pelayanan air limbah dan pemenuhan akses air bersih kepada masyarakat;
4. Banyak tanah berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah tetapi belum disertifikatkan;
5. Kurangnya kompetensi teknis sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;



7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV    PENUTUP**

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga



Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

### **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat



Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana”

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan sebagai berikut:



**Tabel**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	1. Meningkatkan rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman  2. Meningkatkan pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	1.Persentase rumah layak huni  2.Persentase kawasan kumuh  1.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di	63.16  0.054  86.20	63.44  0.050  87.10	63.72  0.047  88.0	64.00  0.043  88.80	64.28  0.040  89.90



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			seluruh kabupaten/kota  2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	78.57	78.59	78.60	78.62	78.63
								100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	0	23.08	46.15	76.92	100
		4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	1.Nilai SAKIP perangkat daerah	70	73	75	77	80
			2. Nilai IKM	78	79	80	81	82



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel ..**  
**Indikator Kinerja Utama**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **Kabupaten Grobogan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI – ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR</b>
1.	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Presentase rumah layak huni dan kawasan kumuh	%	<p>Alasan Pemilihan : <i>Kawasan kumuh merupakan indikator yang dapat mempengaruhi estetika kawasan kota, kesehatan dan masalah sosial lainnya</i></p> <p>Formulasi perhitungan;</p> $\frac{\text{Jumlah unit rumah layak huni}}{\text{jumlah total unit rumah di kabupaten/ kota}} \times 100 \%$
		Presentase kawasan kumuh	%	<p>Formulasi perhitungan;</p> $\frac{\text{Luas kawasan kumuh (sesuai SK Bupati)}}{\text{jumlah total luas wilayah}} \times 100 \%$



NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	FORMULASI – ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
2.	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	<p>Alasan Pemilihan : <i>Air minum merupakan kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah</i></p> <p>Formulasi perhitungan;</p> $\frac{\text{Jumlah Komulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan}}{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga kabupaten}} \times 100 \%$
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	%	<p>Alasan Pemilihan : <i>Sanitasi merupakan kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah</i></p> <p>Formulasi Perhitungan</p>



NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	FORMULASI – ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
				$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan airnya diolah IPALD}}{\text{jumlah rumah di rumah Kabupaten}} \times 100$
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	%	<p>Alasan Pemilihan : <i>PSU merupakan kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah</i></p> $\frac{\text{Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan}}{\text{jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang}} \times 100 \%$

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan  
Tahun 2024

## B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024**  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **Kabupaten Grobogan**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Tahun 2024	Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88,9 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang terbangun	20 unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	5 Unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>			
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 Orang	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</b>			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa</b>			
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Desa	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</b>			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	15 Liter/Detik	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			

	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400 SR	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	72,71 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak	352241 Rumah Tangga	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2 M <sup>3</sup> /Hari	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 Unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa			

	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	55 Desa	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	435 Rumah Tangga	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	270 Orang	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa	100 %	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	SEKRETARIAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	SEKRETARIAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	SEKRETARIAT
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	SEKRETARIAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	SEKRETARIAT
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	SEKRETARIAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	82 Paket	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400 Paket	SEKRETARIAT

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40000 Paket	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan/Material			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1055 Laporan	SEKRETARIAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT
Pengadaan Mebel			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	SEKRETARIAT

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	SEKRETARIAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	SEKRETARIAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	SEKRETARIAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	BIDANG PERUMAHAN
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	BIDANG PERUMAHAN

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	100 %	BIDANG PERUMAHAN
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	60 Unit Rumah	BIDANG PERUMAHAN
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	BIDANG PERUMAHAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	- %	BIDANG PERUMAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	BIDANG PERUMAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	44,66 %	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Dokumen Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang tersusun	100 %	BIDANG PERUMAHAN
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			

	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	4 Dokumen	BIDANG PERUMAHAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	300 unit 7 Ha	BIDANG PERUMAHAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	BIDANG PERUMAHAN
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	BIDANG PERUMAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	BIDANG PERUMAHAN
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			

	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4 Rumah Tangga	BIDANG PERUMAHAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	BIDANG PERUMAHAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	BIDANG PERUMAHAN
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	BIDANG PERUMAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100 %	

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	45,83 %	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	68 Lokasi	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	8 Laporan	BIDANG PERUMAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	ersentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pmbangunan yang selesai tepat waktu	100 %	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	2 %	BIDANG PERTANAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	42 %	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah subyek dan obyek redistribusi tanah yang di tetapkan	1 dok	BIDANG PERTANAHAN
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah			
	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	71,43 %	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	2 dok	BIDANG PERTANAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	BIDANG PERTANAHAN

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2024



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

#### Tabel

#### Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	63.73%	
		Persentase kawasan kumuh	%	0.047%	

2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	87.93%	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78.60%	
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	%	52.50%	
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi	Nilai IKM	Skor	80 Skor	

	<i>perkantoran pemerintahan yang baik</i>				
--	---	--	--	--	--

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan :

**Tabel**

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	ANGGARAN PENETAPAN 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			40.973.396.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.473.396.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			19.081.178.368,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88,9 %	6.601.390.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang terbangun	20 unit	6.601.390.000,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			

	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	5 Unit	500.000.000,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	15 Liter/Detik	6.101.390.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	72,71 %	12.479.788.368,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak	352241 Rumah Tangga	12.479.788.368,00
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	435 Rumah Tangga	12.479.788.368,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			20.392.217.632,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa	100 %	5.300.677.182,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	60.060.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	55.060.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan	100 %	3.682.238.000,00

	penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.651.858.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	17.880.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.000.000,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	136.600.000,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	136.600.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	674.893.742,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	82 Paket	5.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.988.100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400 Paket	131.400.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40000 Paket	30.827.642,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	30.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	149.216.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1055 Laporan	298.462.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	435.494.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan	10.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	189.712.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235.782.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	311.391.440,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	76.393.900,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	50 Unit	234.997.540,00

	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	30.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	100 %	30.000.000,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	60 Unit Rumah	30.000.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	6.445.000.000,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.445.000.000,00

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	6.445.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100 %	8.616.540.450,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	45,83 %	8.616.540.450,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	68 Lokasi	8.591.540.450,00

Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	8 Laporan	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.500.000.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	71,43 %	1.500.000.000,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	2 dok	1.500.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.500.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>40.973.396.000,00</b>

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Penetapan Tahun 2024</b>	<b>Target Perubahan Tahun 2024</b>
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	63.73%	63.73%
		Persentase kawasan kumuh	%	0.047%	0.047%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	87.93%	87.93%

		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78.60%	78.60%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	%	52.50%	52.50%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Skor	80 Skor	80 Skor

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024*

**Tabel**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten**  
**Grobogan Tahun 2024**

<i>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</i>	<i>Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</i>	<i>Target 2024</i>	<i>ANGGARAN PENETAPAN 2024</i>	<i>ANGGARAN PERUBAHAN 2024</i>
<i>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</i>			<i>40.973.396.000,00</i>	<i>45.104.278.000,00</i>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</i>			<i>39.473.396.000,00</i>	<i>42.711.555.300,00</i>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>			<i>19.081.178.368,00</i>	<i>19.252.944.368,00</i>
<i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</i>	<i>Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak</i>	<i>88,9 %</i>	<i>6.601.390.000,00</i>	<i>6.718.540.000,00</i>
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Jumlah SPAM yang terbangun</i>	<i>20 unit</i>	<i>6.601.390.000,00</i>	<i>6.601.390.000,00</i>

<i>(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>				
<i>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan</i>				
	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>	<i>5 Unit</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>750.000.000,00</i>
<i>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				
	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	<i>15 Liter/Detik</i>	<i>6.101.390.000,00</i>	<i>5.968.540.000,00</i>
<i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</i>	<i>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak</i>	<i>72,71 %</i>	<i>12.479.788.368,00</i>	<i>12.534.404.368,00</i>
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak</i>	<i>352241 Rumah Tangga</i>	<i>12.479.788.368,00</i>	<i>12.479.788.368,00</i>
<i>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</i>				

	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	<i>435 Rumah Tangga</i>	<i>12.479.788.368,00</i>	<i>12.534.404.368,00</i>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>			<i>20.392.217.632,00</i>	<i>23.458.610.932,00</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa</i>	<i>100 %</i>	<i>5.300.677.182,00</i>	<i>6.189.633.482,00</i>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	<i>100 %</i>	<i>60.060.000,00</i>	<i>60.060.000,00</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>

<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>55.060.000,00</i>	<i>145.111.000,00</i>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<i>3.682.238.000,00</i>	<i>3.682.238.000,00</i>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>				
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>24 Orang/bulan</i>	<i>3.651.858.000,00</i>	<i>3.577.069.000,00</i>
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>17.880.000,00</i>	<i>17.880.000,00</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				

	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<i>136.600.000,00</i>	<i>136.600.000,00</i>
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>50 Orang</i>	<i>136.600.000,00</i>	<i>136.600.000,00</i>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<i>674.893.742,00</i>	<i>674.893.742,00</i>
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>				
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>82 Paket</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>19.820.000,00</i>

<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>				
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>29.988.100,00</i>	<i>78.745.300,00</i>
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>				
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>1400 Paket</i>	<i>131.400.000,00</i>	<i>228.976.000,00</i>
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>				
	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>40000 Paket</i>	<i>30.827.642,00</i>	<i>46.488.442,00</i>
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>				
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>60 Dokumen</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>				
	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>3 Paket</i>	<i>149.216.000,00</i>	<i>149.216.000,00</i>
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1055 Laporan</i>	<i>298.462.000,00</i>	<i>569.402.000,00</i>

<i>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<i>435.494.000,00</i>	<i>435.494.000,00</i>
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>3000 Laporan</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>				
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>189.712.000,00</i>	<i>189.712.000,00</i>
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>				
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>235.782.000,00</i>	<i>228.187.500,00</i>
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	<i>100 %</i>	<i>311.391.440,00</i>	<i>311.391.440,00</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>				

	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>10 Unit</i>	<i>76.393.900,00</i>	<i>167.428.700,00</i>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>				
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>50 Unit</i>	<i>234.997.540,00</i>	<i>574.997.540,00</i>
<i>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>784.472.000,00</i>
<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi</i>	<i>100 %</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>
<i>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</i>				
	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	<i>60 Unit Rumah</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>707.450.000,00</i>
<i>Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				

	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Unit Rumah</i>	<i>0,00</i>	<i>33.500.000,00</i>
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				
	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>0,00</i>	<i>43.522.000,00</i>
<i>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</i>	-	-	<i>6.445.000.000,00</i>	<i>5.156.785.000,00</i>
<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	<i>6.445.000.000,00</i>	<i>6.445.000.000,00</i>
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				

	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	<i>200 Unit Rumah</i>	<i>6.445.000.000,00</i>	<i>5.156.785.000,00</i>
<i>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</i>	<i>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)</i>	<i>100 %</i>	<i>8.616.540.450,00</i>	<i>11.327.720.450,00</i>
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah</i>	<i>45,83 %</i>	<i>8.616.540.450,00</i>	<i>8.616.540.450,00</i>
<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>				
	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	<i>68 Lokasi</i>	<i>8.591.540.450,00</i>	<i>11.302.720.450,00</i>
<i>Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang</i>				

	<i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</i>			<i>1.500.000.000,00</i>	<i>2.392.722.700,00</i>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</i>			<i>1.500.000.000,00</i>	<i>2.392.722.700,00</i>
<i>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</i>	<i>Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun</i>	<i>71,43 %</i>	<i>1.500.000.000,00</i>	<i>2.392.722.700,00</i>
<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun</i>	<i>2 dok</i>	<i>1.500.000.000,00</i>	<i>1.500.000.000,00</i>
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</i>				
	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.500.000.000,00</i>	<i>2.392.722.700,00</i>
<b><i>JUMLAH</i></b>			<b><i>40.973.396.000,00</i></b>	<b><i>45.104.278.000,00</i></b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

## **B. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

## 1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024

**Tabel**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	1. Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	76.77	76.77	100%	Sangat Tinggi/	Renstra 2021-2026 Disperakim Grobogan dan Laporan Capaian Kinerja Disperakim 2024
1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	1. Persentase rumah layak huni  2. Persentase kawasan kumuh	63.72  0.047	63.72  0.047	100%	Sangat Tinggi	Renstra 2021-2026 Disperakim Grobogan Laporan Capaian Kinerja Disperakim 2024

1.2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	<p>1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota</p> <p>2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<b>88.00</b>	<b>88.6</b>	100%	Sangat Tinggi	Renstra 2021-2026 Disperakim Grobogan Laporan Capaian Air Minum dan Sanitasi Disperakim 2024
			<b>72.55</b>	<b>78.64</b>	100%	Sangat Tinggi	
1.3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	<b>46.15</b>	<b>46.15</b>	100%	Sangat Tinggi	Renstra 2021-2026 Disperakim Grobogan

							Renstra 2021-2026 Disperakim Grobogan Laporan Sertifikat Tanah Pemkab Disperakim 2024
<b>2.</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah	<b>75</b>	66,85	89%	Tinggi	LHE SAKIP Internal dan Renstra 2021-2026 Disperakim Grobogan
2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80	79,167	98%	Sangat Tinggi	Laporan IKM Disperakim Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 100% atau kategori Sangat Tinggi .Dan capaian kinerja sasaran 1.2 mencapai 100% atau kategori Sangat Tinggi Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 100%, dengan kategori Sangat Tinggi.

Sedangkan Indikator Kinerja Tujuan 2 capaiannya sebesar 89% dengan kategori Tinggi dengan capaian indicator kinerja sasaran 2.1 mencapai 98% atau kategori Sangat Tinggi . Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 2 mencapai 93%, dengan kategori Sangat Tinggi

## **2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
<b>1</b>	<b>Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan</b>	1. Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	<b>75.98</b>	<b>75.98</b>	<b>100%</b>	<b>76.38</b>	<b>76.38</b>	<b>100%</b>	<b>76.77</b>	<b>76.77</b>	<b>100%</b>
1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	1. Persentase rumah layak huni 2. Persentase kawasan kumuh	<b>63.16</b>	<b>63.16</b>	<b>100%</b>	<b>63.44</b>	<b>63.44</b>	<b>100%</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>	<b>100%</b>
1.2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan	<b>86.20</b>	<b>86.20</b>	<b>100%</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>	<b>100%</b>	<b>88.00</b>	<b>88.6</b>	<b>101%</b>

	limbah yang layak dan aman	akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota									
		2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.57	78.57	100%	78.59	78.59	100%	72.55	78.64	108%
1.3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	0	0	0	23.08	23.08	100%	46.15	46.15	100%
2.	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah	70	70	100%	73	70	95%	75	66	85%

2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78	78,9	101%	79	78,9	99%	80	79,4	98%
-----	---	-----------	----	------	------	----	------	-----	----	------	-----

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan tren positif yang dibuktikan adanya kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2022 dari 100% tetap menjadi 100% di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan 100% tetap menjadi 100%. Selanjutnya, capaian kinerja sasaran 1.1 dan indikator sasaran 1.2 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. bahwa capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 setiap tahun mengalami kenaikan, setiap tahunnya.

Sedangkan capaian indikator tujuan 2 mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai 100% dan tahun 2023 turun menjadi 95 %, dan mengalami **penurunan lagi** pada tahun 2024 menjadi 85%. Untuk sasaran tujuan 2.1 cenderung mengalami **penurunan** dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 mencapai 101% dan mengalami **penurunan** pada tahun 2023 menjadi 99% tetapi mengalami **penurunan lagi** pada tahun 2024 menjadi 98%.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel**

**Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	1. Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	76.77	77.57	98%

1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	1. Persentase rumah layak huni	63.72	64.28	99%
		2. Persentase kawasan kumuh	0.047	0.0395	84%
1.2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.00	89.8	97%
		2. Persentase jumlah rumah	78.60	78.63	99%

		tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
1.3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	46.15	100	46%
<b>2.</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah	66,85	80	83%
2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung	Nilai IKM	79,167	82	96%

dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik					
--	--	--	--	--	--

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 98%, sehingga untuk potensi mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 99% dan 84%, untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.2 mencapai 97% dan 99%, untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.3 mencapai 46%.

Sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja tujuan 2 mencapai 83%, sehingga untuk mencapai target jangka menengah memerlukan percepatan dalam pencapaiannya, dan tingkat kemajuan indikator sasaran 2.1 mencapai 96%.

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

No.	Indikator Kinerja Utama	Target			Persentase capaian		Persentase capaian	Keterangan
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	Nasional	Provinsi	Kabupaten	
1.	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	70%	82,3%	63,72%	70%	82,3%	63,72%	Sesuai Target
2.	Meningkatnya pemenuhan akses air minum Layak dan Aman	100%	100%	88%	100%	100%	88,6%	Melebihi target
3.	Meningkatnya pemenuhan akses Sanitasi Layak dan Aman	90 %	95%	72,71%	90 %	95%	78,64%	Melebihi target

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 pada Tujuan indikator kinerja Utama Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman mencapai 63,72%, sehingga untuk potensi mencapai target jangka menengah atau resntra pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran Meningkatnya pemenuhan akses air minum Layak dan Aman mencapai 88,6% dan melebihi target dari tahun 2024 yang ditetapkan yaitu 88% dan sedangkan indikator kinerja sasaran Meningkatnya pemenuhan akses Sanitasi Layak dan Aman 78,64% melebihi target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 72,71%.

## 5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	1.Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	76.77	76.77	100%	<p>a. Faktor Keberhasilan : Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain;</p> <p>b. Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat;</p> <p>c. Kebijakan nasional 100-0-100 dalam percepatan penanganan kawasan kumuh;</p>	<p>a.Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam membangun rumah layak huni;</p> <p>b.Pemberian bantuan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni;</p> <p>c.Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni melalui Bantuan</p>

1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	1. Persentase rumah layak huni	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>		<p>d. Peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan rumah layak huni</p> <p>Faktor Kegagalan :</p> <p>a. Belum terintegrasinya PSU di kawasan permukiman secara menyeluruh;</p> <p>b. Pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota</p> <p>c. Belum tersedianya database rumah korban bencana;</p> <p>d. Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni;</p>	<p>Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);</p> <p>d. Rehabilitasi rumah akibat bencana dan relokasi akibat dampak program pemerintah. Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh;</p> <p>e. Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;</p> <p>f. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui donas CSR untuk membantu pembiayaan dan penanganan permukiman kumuh.</p>
		2. Persentase kawasan kumuh	<b>0.047</b>	<b>0.047</b>	<b>100%</b>		

1.2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	<p>1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota</p> <p>2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air</p>	<p><b>88.00%</b></p> <p><b>72.5%</b></p>	<p><b>88.6%</b></p> <p><b>78.60%</b></p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>100%</b></p>		<p>a.Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang erintegrasi;</p> <p>b.Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat;</p> <p>c..Pengembangan (pembangunan baru, peningkatan dan perluasan) serta pengelolaan (operasi, pemeliharaan dan perbaikan) SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi.</p> <p>d.Penyusunan dokumen legal formal terkait pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas;</p> <p>e Penyehatan Lingkungan (APML);</p> <p>f.Pembangunan infrastruktur sanitasi;</p> <p>g.Pelaksanaan program perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p>
-----	---	--	--	--	---------------------------------------	--	---

limbah  
domestik

							<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan dokumen inventarisasi obyek pertanahan.</li><li>b. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pertanahan;</li><li>c. Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan;</li><li>d. Pendataan dan pensertifikatan tanah (fasum dan fasos) yang sudah diserahkan dari pengembang ke pemerintah daerah;</li><li>e. Fasilitasi sertifikasi tanah massal.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

1.3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	46.15%	46.15%	100%	<p>Faktor Keberhasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Sertifikasi Tanah secara Massal</li> <li>b. Kordinasi dengan pihak terkait seperti BPN, BPPKAD (Aset) dan Kelurahan</li> <li>c. Pendataan tanah yang masuk dalam aset Pemkab Grobogan.</li> </ul> <p>Faktor Kegagalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk digunakan sebagai hunian “liar”;</li> <li>b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah;</li> <li>c. Banyak tanah berupa fasos dan fasmus dari</li> </ul>	
-----	---	---	--------	--------	------	--	--

						pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah belum bersertifikat.	
2.	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah	75	66	85%	<p>Faktor Keberhasilan :</p> <p>1. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</p> <p>2. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ;</p> <p>3. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus;</p> <p>4. Peraturan perundang-undangan yang jelas</p>	<p>a. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan; evaluasi serta pelaporan kinerja yang efektif dan efisien;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya SDM teknis perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;</p> <p>c. Pengelolaan aset secara optimal memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;</p>

Faktor Kegagalan :

1.Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas, tidak ada staf teknis ASN, sebagian besar staf teknis merupakan Non ASN selain itu banyak pejabat ASN yang sudah purna tugas;

2.Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama komputer, printer, scaner, gedung kantor dan kendaraan operasional baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua);

2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80	79,4	98%		
-----	---	-----------	----	------	-----	--	--

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	100	100	100%	<b>49,468,228,000</b>	<b>47,707,018,192</b>	96%	4%	49,468,228,000	1,761,209,808	Efisien
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	100	100	100%	<b>47,091,505,300</b>	<b>45,437,971,599</b>	96%	4%	47,091,505,300	1,653,533,701	Efisien

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	100	100	100%	<b>19,806,894,368</b>	<b>18,831,821,750</b>	95%	5%	19,806,894,368	975,072,618	Efisien
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	100	100	100%	<b>7,272,490,000</b>	<b>6,848,154,250</b>	94%	6%	7,272,490,000	424,335,750	Efisien
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	100	100%	<b>7,272,490,000</b>	<b>6,848,154,250</b>	94%	6%	7,272,490,000	424,335,750	Efisien
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	100	100	100%	1,303,950,000	1,266,939,000	97%	3%	1,303,950,000	37,011,000	Efisien
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100	100	100%	5,968,540,000	5,581,215,250	94%	7%	5,968,540,000	387,324,750	Efisien
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	100	100	100%	<b>12,534,404,368</b>	<b>11,983,667,500</b>	96%	5%	12,534,404,368	550,736,868	Efisien
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam</b>	100	100	100%	<b>12,534,404,368</b>	<b>11,983,667,500</b>	96%	5%	12,534,404,368	550,736,868	Efisien

<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>											
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100	100	100%	12,534,404,368	11,983,667,500	96%	5%	12,534,404,368	550,736,868	Efisien	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	100	100	100%	<b>27,284,610,932</b>	<b>26,606,149,849</b>	98%	3%	27,284,610,932	678,461,083	Efisien	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100	100	100%	<b>6,205,633,482</b>	<b>5,842,148,338</b>	94%	6%	6,205,633,482	363,485,144	Efisien	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	<b>150,111,000</b>	<b>147,312,000</b>	98%	2%	150,111,000	2,799,000	Efisien	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100%	5,000,000	4,842,000	97%	3%	5,000,000	158,000	Efisien	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	145,111,000	142,470,000	98%	2%	145,111,000	2,641,000	Efisien	

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	<b>3,609,949,000</b>	<b>3,441,219,733</b>	95%	5%	3,609,949,000	168,729,267	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100%	3,577,069,000	3,409,963,733	95%	5%	3,577,069,000	167,105,267	Efisien
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100%	17,880,000	17,880,000	100%	0%	17,880,000	-	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100%	7,500,000	7,332,000	98%	2%	7,500,000	168,000	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100	100	100%	7,500,000	6,044,000	81%	24%	7,500,000	1,456,000	Efisien
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	<b>136,600,000</b>	<b>132,264,500</b>	97%	3%	136,600,000	4,335,500	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	100	100%	136,600,000	132,264,500	97%	3%	136,600,000	4,335,500	Efisien
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	<b>1,138,647,742</b>	<b>1,052,978,906</b>	92%	8%	1,138,647,742	85,668,836	Efisien

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100%	19,820,000	19,700,500	99%	1%	19,820,000	119,500	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100%	94,745,300	84,157,000	89%	13%	94,745,300	10,588,300	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	100%	228,976,000	208,360,000	91%	10%	228,976,000	20,616,000	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100%	46,488,442	33,619,100	72%	38%	46,488,442	12,869,342	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100%	30,000,000	26,925,000	90%	11%	30,000,000	3,075,000	Efisien
Penyediaan Bahan/Material	100	100	100%	149,216,000	117,146,200	79%	27%	149,216,000	32,069,800	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100%	569,402,000	563,071,106	99%	1%	569,402,000	6,330,894	Efisien
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100%	<b>427,899,500</b>	<b>389,943,573</b>	91%	10%	427,899,500	37,955,927	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100%	10,000,000	9,900,000	99%	1%	10,000,000	100,000	Efisien

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100%	189,712,000	176,099,372	93%	8%	189,712,000	13,612,628	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100%	228,187,500	203,944,201	89%	12%	228,187,500	24,243,299	Efisien
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100%	<b>742,426,240</b>	<b>678,429,626</b>	91%	9%	742,426,240	63,996,614	Efisien
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100%	167,428,700	123,841,626	74%	35%	167,428,700	43,587,074	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100%	574,997,540	554,588,000	96%	4%	574,997,540	20,409,540	Efisien
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	100	100	100%	<b>784,472,000</b>	<b>784,472,000</b>	100%	0%	784,472,000	-	Impas
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	100	100	100%	<b>784,472,000</b>	<b>784,472,000</b>	100%	0%	784,472,000	-	Impas

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100	100	100%	784,472,000	784,472,000	100%	0%	784,472,000	-	Impas
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	100	100	100%	<b>8,966,785,000</b>	<b>8,940,126,318</b>	100%	0%	8,966,785,000	26,658,682	Efisien
<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	100	100%	<b>8,966,785,000</b>	<b>8,940,126,318</b>	100%	0%	8,966,785,000	26,658,682	Efisien
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 sepuluh) Ha	100	100	100%	8,966,785,000	8,940,126,318	100%	0%	8,966,785,000	26,658,682	Efisien
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	100	100	100%	<b>11,327,720,450</b>	<b>11,039,403,193</b>	97%	3%	11,327,720,450	288,317,257	Efisien

<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	100	100	100%	<b>11,327,720,450</b>	<b>11,039,403,193</b>	97%	3%	11,327,720,450	288,317,257	Efisien
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100	100	100%	11,302,720,450	11,014,598,193	97%	3%	11,302,720,450	288,122,257	Efisien
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	100	100	100%	25,000,000	24,805,000	99%	1%	25,000,000	195,000	Efisien
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	100	100	100%	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	95%	5%	2,376,722,700	107,676,107	Efisien
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	100	100	100%	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	95%	5%	2,376,722,700	107,676,107	Efisien
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	100	100	100%	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	95%	5%	2,376,722,700	107,676,107	Efisien
<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	100	100%	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	95%	5%	2,376,722,700	107,676,107	Efisien

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100	100	100%	2,376,722,700	2,269,046 ,593	95%	5%	2,376,722,700	107,676,107	Efisien
---	-----	-----	------	---------------	-------------------	-----	----	---------------	-------------	---------

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	76.77%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	<b>100%</b>	Menunjang
				Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	<b>40.11%</b>	Menunjang
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	<b>2.42%</b>	Menunjang

				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	<b>100 %</b>	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	<b>88%</b>	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	<b>72.55%</b>	Menunjang
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	<b>42.86 %</b>	Menunjang
2.	Meningkatkan tata kelola	Nilai SAKIP	75 %	Program Penunjang	Persentase Laporan	100%	Menunjang

	pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	perangkat daerah		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik		
--	--	------------------	--	--	---	--	--

Dari analisis program/kegiatan di atas, terdapat 2 tujuan,2 sasaran dan 8 program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

### C. Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
		Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	Fisik (%)	
<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>49,468,228,000</b>	<b>47,707,018,192</b>	<b>96.44</b>	<b>49,468,228,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,761,209,808</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>47,091,505,300</b>	<b>45,437,971,599</b>	<b>96.49</b>	<b>47,091,505,300</b>	<b>100.00</b>	<b>1,653,533,701</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>19,806,894,368</b>	<b>18,831,821,750</b>	<b>95.08</b>	<b>19,806,894,368</b>	<b>100.00</b>	<b>975,072,618</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>7,272,490,000</b>	<b>6,848,154,250</b>	<b>94.17</b>	<b>7,272,490,000</b>	<b>100.00</b>	<b>424,335,750</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,272,490,000</b>	<b>6,848,154,250</b>	<b>94.17</b>	<b>7,272,490,000</b>	<b>100.00</b>	<b>424,335,750</b>
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1,303,950,000	1,266,939,000	97.16	1,303,950,000	100.00	37,011,000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5,968,540,000	5,581,215,250	93.51	5,968,540,000	100.00	387,324,750
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>12,534,404,368</b>	<b>11,983,667,500</b>	<b>95.61</b>	<b>12,534,404,368</b>	<b>100.00</b>	<b>550,736,868</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12,534,404,368</b>	<b>11,983,667,500</b>	<b>95.61</b>	<b>12,534,404,368</b>	<b>100.00</b>	<b>550,736,868</b>
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	12,534,404,368	11,983,667,500	95.61	12,534,404,368	100.00	550,736,868
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>27,284,610,932</b>	<b>26,606,149,849</b>	<b>97.51</b>	<b>27,284,610,932</b>	<b>100.00</b>	<b>678,461,083</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,205,633,482</b>	<b>5,842,148,338</b>	<b>94.14</b>	<b>6,205,633,482</b>	<b>100.00</b>	<b>363,485,144</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150,111,000</b>	<b>147,312,000</b>	<b>98.14</b>	<b>150,111,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,799,000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	4,842,000	96.84	5,000,000	100.00	158,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145,111,000	142,470,000	98.18	145,111,000	100.00	2,641,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,609,949,000</b>	<b>3,441,219,733</b>	<b>95.33</b>	<b>3,609,949,000</b>	<b>100.00</b>	<b>168,729,267</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,577,069,000	3,409,963,733	95.33	3,577,069,000	100.00	167,105,267
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17,880,000	17,880,000	100.00	17,880,000	100.00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,500,000	7,332,000	97.76	7,500,000	100.00	168,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	7,500,000	6,044,000	80.59	7,500,000	100.00	1,456,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>136,600,000</b>	<b>132,264,500</b>	<b>96.83</b>	<b>136,600,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,335,500</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136,600,000	132,264,500	96.83	136,600,000	100.00	4,335,500
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,138,647,742</b>	<b>1,052,978,906</b>	<b>92.48</b>	<b>1,138,647,742</b>	<b>100.00</b>	<b>85,668,836</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,820,000	19,700,500	99.40	19,820,000	100.00	119,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,745,300	84,157,000	88.82	94,745,300	100.00	10,588,300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228,976,000	208,360,000	91.00	228,976,000	100.00	20,616,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,488,442	33,619,100	72.32	46,488,442	100.00	12,869,342
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	26,925,000	89.75	30,000,000	100.00	3,075,000
Penyediaan Bahan/Material	149,216,000	117,146,200	78.51	149,216,000	100.00	32,069,800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	569,402,000	563,071,106	98.89	569,402,000	100.00	6,330,894
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>427,899,500</b>	<b>389,943,573</b>	<b>91.13</b>	<b>427,899,500</b>	<b>100.00</b>	<b>37,955,927</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	9,900,000	99.00	10,000,000	100.00	100,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189,712,000	176,099,372	92.82	189,712,000	100.00	13,612,628
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228,187,500	203,944,201	89.38	228,187,500	100.00	24,243,299
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>742,426,240</b>	<b>678,429,626</b>	<b>91.38</b>	<b>742,426,240</b>	<b>100.00</b>	<b>63,996,614</b>

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167,428,700	123,841,626	73.97	167,428,700	100.00	43,587,074
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	574,997,540	554,588,000	96.45	574,997,540	100.00	20,409,540
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>784,472,000</b>	<b>784,472,000</b>	<b>100.00</b>	<b>784,472,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>784,472,000</b>	<b>784,472,000</b>	<b>100.00</b>	<b>784,472,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	784,472,000	784,472,000	100.00	784,472,000	100.00	0
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>8,966,785,000</b>	<b>8,940,126,318</b>	<b>99.70</b>	<b>8,966,785,000</b>	<b>100.00</b>	<b>26,658,682</b>
<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,966,785,000</b>	<b>8,940,126,318</b>	<b>99.70</b>	<b>8,966,785,000</b>	<b>100.00</b>	<b>26,658,682</b>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8,966,785,000	8,940,126,318	99.70	8,966,785,000	100.00	26,658,682
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>11,327,720,450</b>	<b>11,039,403,193</b>	<b>97.45</b>	<b>11,327,720,450</b>	<b>100.00</b>	<b>288,317,257</b>
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>11,327,720,450</b>	<b>11,039,403,193</b>	<b>97.45</b>	<b>11,327,720,450</b>	<b>100.00</b>	<b>288,317,257</b>
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11,302,720,450	11,014,598,193	97.45	11,302,720,450	100.00	288,122,257
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	25,000,000	24,805,000	99.22	25,000,000	100.00	195,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	<b>95.47</b>	<b>2,376,722,700</b>	<b>100.00</b>	<b>107,676,107</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	<b>95.47</b>	<b>2,376,722,700</b>	<b>100.00</b>	<b>107,676,107</b>
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>2,376,722,700</b>	<b>2,269,046,593</b>	<b>95.47</b>	<b>2,376,722,700</b>	<b>100.00</b>	<b>107,676,107</b>

Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2,376,722,700	2,269,046,593	95.47	2,376,722,700	100.00	107,676,107
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	2,376,722,700	2,269,046,593	95.47	2,376,722,700	100.00	107,676,107

Dari analisis realisasi Fisik dan Keuangan, untuk Kegiatan Fisik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terlaksana 100% untuk 8 Program, sedangkan untuk realisasi Keuangan terdapat 7 Program dari 8 Program yang belum 100%. Sedangkan Perbandingan Realisasi Fisik tahun 2024 dengan tahun 2023 tetap sama **yaitu 100%**. Sedangkan Realisasi Keuangan menurun **tahun 2024 yaitu 96,44% dengan sisa anggaran 1,761,209,808 dari tahun 2023 yaitu 97,26% dengan sisa anggaran 1,424,030,777.**

## **7. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

### **7.1 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

#### **A. JENIS PELAYANAN DASAR**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan awasan Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

#### **B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH.**

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024, pada tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	352 RT	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	7,272,490,000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	352241 RT	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	12,479,788,358

### C. ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tabel berikut :

Tabel

Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber dana Lain yang sah
1	2	3	4	5	6
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1,303,950,000		5,968,540,000	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik			12,479,788,358	
<b>Jumlah</b>					

#### D. HASIL CAPAIAN SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah menerapkan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan target dan indikator penerima layanan SPM pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20  
 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
 Grobogan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	352 RT	352 RT	100%	7,272,490,000	6,848,154,250	94.17
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	352241 RT	352241 RT	100%	12,479,788,358	11,983,667,500	95.61
<b>Jumlah</b>							

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 95,51%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar sebesar 80% pada tabel berikut :

Tabel

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah yang Terlayani (orang)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	352 RT	352 RT	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	352241 RT	352241 RT	100%	100%

Presentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	<b>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>			<b>100</b>	<b>20</b>
	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	352 RT	352 RT	100	<b>20%</b>
	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	88,9%	88,9%	100	
	Jaringan Perpipaan	15 Liter/Detik	15 Liter/Detik	100	
	Jaringan bukan perpipaan	169 Unit	169 Unit	100	
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik</b>			<b>100</b>	<b>20</b>
	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	435 Unit	435 Unit	100	<b>20%</b>
	Kualitas pelayanan air limbah domestik	72,71%	72,71%	100	
	Sub-Sistem pengolahan setempat	352241 RT	352241 RT	100	

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80	20	100	TUNTAS UTAMA
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	80	20	100	TUNTAS UTAMA
<b>BIDANG URUSAN PUPR</b>				<b>100</b>	<b>Tuntas Utama</b>

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar **100** dengan kategori **Tuntas Utama**, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah mencapai 100% di tahun 2024.

#### E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
<b>INTERNAL</b>			
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- Sulitnya mencari sumber air baku di kawasan Kendeng Selatan  - Alokasi anggaran APBD yang terbatas	- Rekayasa alam dengan pembuatan embung ataupun sumur resapan  - Pengusulan anggaran dari APBN, DAK, Hibah, CSR ataupun yang lainnya
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Keterbatasan lahan desa dan topografi untuk area pengolahan limbah komunal	Penganggaran APBD untuk pembebasan lahan
<b>EKSTERNAL</b>			
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	-	-

## 7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

### A. JENIS LAYANAN DASAR.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan

Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

## B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH.

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024, pada tabel berikut:

Tabel

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	30,000,000

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kotayang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	32,500,000

### C. ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tabel berikut :

Tabel

Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber dana Lain yang sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30,000,000			
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32,500,000			
<b>Jumlah</b>					

#### D. HASIL CAPAIAN SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah menerapkan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan target dan indikator penerima layanan SPM dilihat pada tabel berikut :

Tabel  
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	100	30,000,000	30,000,000	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	100	32,500,000	32,500,000	100
<b>Jumlah</b>					<b>62,500,000</b>	<b>62,500,000</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 100%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks

Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar sebesar 80% pada tabel berikut :

Tabel

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah yang Terlayani (orang)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6	6	100	80
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	80

Persentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel  
 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM  
 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
 Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>				
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	6	6	100	<b>20</b>
2	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Subsidi uang sewa	1	1	100	<b>20</b>
	Penyediaan rumah layak huni				

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagaimana pada table berikut ini:

Tabel

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Utama
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Utama
<b>BIDANG URUSAN PERAKIM</b>				<b>100</b>	<b>Tuntas Utama</b>

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori **Tuntas Utama** hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada dinilai kurang dari 100%

## E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
<b>INTERNAL</b>			
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran APBD yang terbatas</li> <li>-Lokasi Bencana yang susah dijangkau</li> </ul>	Melakukan sinkronisasi pendataan, dan koordinasi dengan OPD terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan sehingga dapat dilakukan penanganan bencana lebih cepat
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tidak adanya kegiatan dan anggaran yang dilakukan</li> <li>-Tidak ada bencana yang menyebabkan relokasi rumah ke desa lain.</li> </ul>	Usulan kegiatan dan penganggaran Di Perubahan untuk kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
EKSTERNAL			
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-

# **BAB IV**

# **PENUTUP**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan, sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 76,77% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar Persentase rumah layak huni 63.72% dan Persentase kawasan kumuh 0.047 % (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota 88% dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 78,60% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pertanahan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan sebesar 46,15 % (kategori sangat tinggi)
- Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar 66,86 Nilai (kategori tinggi)
- Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai IKM sebesar 79 SKOR (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 49,468,228,000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 47,707,018,192 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 96% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4%.

Untuk Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dengan Anggaran Rp. 19,806,894,368 sedangkan realisasi anggaran SPM mencapai Rp. 18,831,821,750 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran SPM sebesar 95% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5%.

Urusan Perumahan Rakyat dengan Anggaran Rp. 817,972,000 sedangkan realisasi anggaran SPM mencapai Rp. 817,972,000 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran SPM sebesar 100% dan nilai impas anggaran sebesar 0%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730726 199803 2 006




PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN



NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK (KK)	JARINGAN PERPIPAAN				TOTAL AIR MINUM PERPIPAAN (Jiwa)	AIR MINUM LAYAK PERPIPAAN (Jiwa)	BJP (DINKES) TERLINDUNGI (Jiwa)	BJP LAYAK (Jiwa)	BJP TAK TERLINDUNGI (Jiwa)	TOTAL AIR MINUM BJP (Jiwa)	ARSES AIR MINUM LAYAK (Jiwa)
				PDAM (Jiwa)	DAK (Jiwa)	PAMSIMAS (Jiwa)	LAINNYA (Jiwa)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8	10 = 9	11	12	13	14 = 11+12+13	15 = 9+14
1	BRATI	51,478	17,879	10,645	1,410	5,075	1,840	18,970	18,970	-	33,416	-	33,416	52,386
2	GABUS	75,316	26,970	2,255	4,420	5,135	500	12,310	12,310	-	65,004	-	65,004	77,314
3	GEYER	60,222	20,074	4,585	1,960	2,580	140	9,265	9,265	-	12,308	-	12,308	21,573
4	GODONG	88,781	31,004	4,390	5,880	15,163	2,185	27,618	27,618	-	61,057	-	61,057	88,675
5	GROBOGAN	79,569	27,347	3,660	2,460	6,644	1,335	14,099	14,099	-	56,788	542	57,330	71,429
6	GUBUG	86,448	29,210	1,550	3,200	19,504	2,375	26,629	26,629	-	66,843	-	66,843	93,472
7	KARANGRAYUNG	102,991	35,839	745	3,980	12,350	3,485	20,560	20,560	-	63,222	607	63,829	84,389
8	KEDUNGJATI	44,929	15,467	-	1,175	3,473	500	5,148	5,148	-	24,544	-	24,544	29,692
9	KLAMBU	39,287	15,460	675	3,330	4,008	1,620	9,633	9,633	-	24,429	-	24,429	34,062
10	KRADENAN	84,589	29,738	5,835	3,785	3,646	-	13,266	13,266	-	73,727	-	73,727	86,993
11	NGARINGAN	71,065	25,207	3,215	1,100	5,660	420	10,395	10,395	-	27,621	-	27,621	38,016
12	PENAWANGAN	66,388	23,440	4,640	1,890	9,837	-	16,367	16,367	-	29,275	-	29,275	45,642
13	PULOKULON	111,957	39,403	8,270	2,430	2,521	395	13,616	13,616	-	68,923	-	68,923	82,539
14	PURWODADI	141,973	49,569	95,095	865	986	-	96,946	96,946	-	84,318	-	84,318	181,264
15	TANGGUNG HARJO	42,698	14,716	5,210	1,050	3,101	-	9,361	9,361	-	28,794	-	28,794	38,155
16	TAWANG HARJO	58,844	13,199	5,970	2,460	4,196	3,260	15,886	15,886	-	45,638	-	45,638	61,524
17	TEGOWANU	58,512	20,230	11,320	1,036	12,827	1,540	26,723	26,723	-	25,772	-	25,772	52,495
18	TOROH	119,622	42,910	14,310	4,896	6,839	500	26,545	26,545	-	83,315	-	83,315	109,860
19	WIROSARI	94,837	33,422	5,625	3,130	10,810	1,215	20,780	20,780	-	40,902	-	40,902	61,682
JUMLAH		1,479,506	511,084	187,995	50,457	134,355	21,310	394,117	394,117	-	915,896	1,149	917,045	1,311,162
PERSENTASE				12.71%	3.41%	9.08%	1.44%	26.64%	26.64%	0.00%	61.91%	0.08%	61.98%	88.62%

Purwodadi, 20 Januari 2025  
 KEPALA DINAS  
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KABUPATEN GROBOGAN



*Endang Sulistyoningsih, S.T., M.T.*  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19730726 199803 2 006

**CAKUPAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	JUMLAH DUSUN	JUMLAH KK	PROGRES JSP	PROGRES JSSP	PROGRES SHARING	PROGRES OD	% PROGRES JSP	% PROGRES JSSP	% PROGRES SHARING	% PROGRES OD
1	BRATI	37	53	17548	13860	1405	2283	0	78.98	8.01	13.01	0
2	GABUS	46	95	22746	11742	10767	237	0	51.62	47.34	1.04	0
3	GEYER	48	94	24089	17250	4408	2431	0	71.61	18.30	10.09	0
4	GODONG	56	93	28972	24800	2890	1282	0	85.60	9.98	4.42	0
5	GROBOGAN	53	61	23651	12675	6101	4875	0	53.59	25.80	20.61	0
6	GUBUG	51	57	23963	20533	2136	1294	0	85.69	8.91	5.40	0
7	KARANGRAYUNG	67	103	34396	21128	7813	5455	0	61.43	22.71	15.86	0
8	KEDUNJATI	34	58	15072	9550	2219	3303	0	63.36	14.72	21.91	0
9	KLAMBU	28	36	13298	12057	660	581	0	90.67	4.96	4.37	0
10	KRADENAN	46	75	29196	19838	7303	2055	0	67.95	25.01	7.04	0
11	NGARINGAN	38	82	23783	16014	6539	1230	0	67.33	27.49	5.17	0
12	PENAWANGAN	36	77	21224	16260	4406	558	0	76.61	20.76	2.63	0
13	PULOKULON	70	107	40620	26602	8681	5337	0	65.49	21.37	13.14	0
14	PURWODADI	75	86	48560	44776	1497	2287	0	92.21	3.08	4.71	0
15	TANGGUNGHARJO	27	44	12671	10509	811	1351	0	82.94	6.40	10.66	0
16	TAWANGHARJO	32	58	17829	9512	6091	2226	0	53.35	34.16	12.49	0
17	TEGOWANU	33	50	15172	10283	3314	1575	0	67.78	21.84	10.38	0
18	TOROH	70	118	40029	34513	2370	3146	0	86.22	5.92	7.86	0
19	WIROSARI	49	68	31738	27253	2177	2308	0	85.87	6.86	7.27	0
<b>KABUPATEN GROBOGAN</b>		<b>896</b>	<b>1415</b>	<b>484557</b>	<b>359155</b>	<b>81588</b>	<b>43814</b>	<b>0</b>	<b>74.12</b>	<b>16.84</b>	<b>9.04</b>	<b>0</b>
<b>AKSES SANITASI LAYAK KABUPATEN GROBOGAN</b>		<b>78.64</b>										
<b>AKSES SANITASI DASAR KABUPATEN GROBOGAN</b>		<b>21.36</b>										



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan

**Endang Sulistyoningsih, S.T., M.T**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730726 199803 2 006

**REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA RTLH TAHUN 2024  
KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah BNBA per desa/kelurahan	Jumlah BNBA per kecamatan
1	Brati	Jangkunharjo	127	1,800
2	Brati	Karangsari	294	
3	Brati	Katekan	39	
4	Brati	Kronggen	493	
5	Brati	Lemahputih	107	
6	Brati	Menduran	25	
7	Brati	Tegalsumur	71	
8	Brati	Temon	258	
9	Brati	Tirem	386	
10	Gabus	Banjarejo	743	8,762
11	Gabus	Bendoharjo	1,000	
12	Gabus	Gabus	453	
13	Gabus	Kalipang	621	
14	Gabus	Karangrejo	697	
15	Gabus	Keyongan	441	
16	Gabus	Nglinduk	523	
17	Gabus	Pandanharum	692	
18	Gabus	Pelem	600	
19	Gabus	Sulursari	631	
20	Gabus	Suwatu	301	
21	Gabus	Tahunan	557	
22	Gabus	Tlogotirto	710	
23	Gabus	Tunggulrejo	793	
24	Geyer	Asemrudung	95	3,852
25	Geyer	Bangsri	350	
26	Geyer	Geyer	18	
27	Geyer	Jambangan	445	
28	Geyer	Juworo	115	
29	Geyer	Kalangbancar	280	
30	Geyer	Karanga nyar	1,305	
31	Geyer	Ledokdawan	87	
32	Geyer	Monggot	470	
33	Geyer	Ngrandu	227	
34	Geyer	Rambat	6	
35	Geyer	Sobo	454	
36	Geyer	Suru	-	
37	Godong	Anggaswangi	243	
38	Godong	Bringin	234	
39	Godong	Bugel	167	
40	Godong	Dorolegi	437	
41	Godong	Godong	559	
42	Godong	Guci	204	
43	Godong	Gundi	210	
44	Godong	Guyangan	225	
45	Godong	Harjowinangun	448	
46	Godong	Jatilor	327	
47	Godong	Karanggeneng	537	
48	Godong	Kemloko	451	
49	Godong	Ketangirejo	692	

50	Godong	Wanutunggal	166	9,161
51	Godong	Werduyo	366	
52	Godong	Ketitang	111	
53	Godong	Klampok	163	
54	Godong	Kopek	199	
55	Godong	Latak	526	
56	Godong	Manggarmas	601	
57	Godong	Manggarwetan	419	
58	Godong	Paheasan	263	
59	Godong	Rajek	286	
60	Godong	Sambung	339	
61	Godong	Sumber agung	151	
62	Godong	Sumurgede	300	
63	Godong	Tinanding	298	
64	Godong	Tungu	239	
65	Grobogan	Getasrejo	586	9,329
66	Grobogan	Grobogan	465	
67	Grobogan	Karang rejo	686	
68	Grobogan	Lebak	1,311	
69	Grobogan	Lebengjumuk	339	
70	Grobogan	Ngabenrejo	629	
71	Grobogan	Putatsari	1,563	
72	Grobogan	Rejo sari	965	
73	Grobogan	Sedayu	551	
74	Grobogan	Sumberjatipohon	690	
75	Grobogan	Tanggung harjo	754	
76	Grobogan	Teguhan	790	
77	Gubug	Baturagung	622	8,699
78	Gubug	Ginggangtani	520	
79	Gubug	Gelapan	280	
80	Gubug	Gubug	375	
81	Gubug	Jatipecaron	334	
82	Gubug	Jeketro	350	
83	Gubug	Kemiri	358	
84	Gubug	Kunjeng	417	
85	Gubug	Kuwaron	782	
86	Gubug	Mlilir	379	
87	Gubug	Ngroto	555	
88	Gubug	Papanrejo	254	
89	Gubug	Penadaran	591	
90	Gubug	Pranten	196	
91	Gubug	Ringinharjo	478	
92	Gubug	Ringinkidul	265	
93	Gubug	Rowosari	372	
94	Gubug	Saban	265	
95	Gubug	Tambakan	387	
96	Gubug	Tlogomulyo	506	
97	Gubug	Trisari	413	
98	Karangrayung	Cekel	219	
99	Karangrayung	Dempel	429	
100	Karangrayung	Gunungtumpeng	391	
101	Karangrayung	Jetis	348	
102	Karangrayung	Karang anyar	349	
103	Karangrayung	Karangsono	594	
104	Karangrayung	Ketro	1,352	
105	Karangrayung	Mangin	461	
106	Karangrayung	Mojoagung	471	

107	Karangrayung	Nampu	1,219	10,386	
108	Karangrayung	Pangkalan	344		
109	Karangrayung	Parakan	264		
110	Karangrayung	Putatnganten	652		
111	Karangrayung	Rawoh	278		
112	Karangrayung	Sendangharjo	854		
113	Karangrayung	Sumberjosari	915		
114	Karangrayung	Telawah	488		
115	Karangrayung	Temurejo	382		
116	Karangrayung	Termas	376		
117	Kedungjati	Deras	807		7,017
118	Kedungjati	Jumo	864		
119	Kedungjati	Kalimaro	810		
120	Kedungjati	Karanglangu	627		
121	Kedungjati	Kedungjati	466		
122	Kedungjati	Kentengsari	509		
123	Kedungjati	Klitikan	217		
124	Kedungjati	Ngombak	578		
125	Kedungjati	Padas	669		
126	Kedungjati	Panimbo	458		
127	Kedungjati	Prigi	302		
128	Kedungjati	Wates	710		
129	Klambu	Jenengan	264	4,336	
130	Klambu	Kandangrejo	592		
131	Klambu	Klambu	513		
132	Klambu	Menawan	638		
133	Klambu	Penganten	402		
134	Klambu	Selojari	305		
135	Klambu	Taruman	756		
136	Klambu	Terkesi	620		
137	Klambu	Wandankemiri	246		
138	Kradenan	Bago	497	9,130	
139	Kradenan	Banjardowo	690		
140	Kradenan	Banjarsari	545		
141	Kradenan	Crewek	615		
142	Kradenan	Grabagan	417		
143	Kradenan	Kalisari	623		
144	Kradenan	Kradenan	621		
145	Kradenan	Kuwu	552		
146	Kradenan	Pakis	849		
147	Kradenan	Rejosari	769		
148	Kradenan	Sambongbangi	878		
149	Kradenan	Sengonwetan	745		
150	Kradenan	Simo	629		
151	Kradenan	Tanjungsari	700		
152	Ngaringan	Bandungsari	1,455	11,290	
153	Ngaringan	Belor	691		
154	Ngaringan	Kalangdosari	719		
155	Ngaringan	Kalanglundo	1,676		
156	Ngaringan	Ngaraparap	980		
157	Ngaringan	Ngaringan	377		
158	Ngaringan	Pendem	789		
159	Ngaringan	Sarirejo	690		
160	Ngaringan	Sendangrejo	490		
161	Ngaringan	Sumberagung	1,493		
162	Ngaringan	Tanjungharjo	1,016		

163	Ngaringan	Truwolu	914	
164	Penawangan	Bologarang	661	9,112
165	Penawangan	Curut	195	
166	Penawangan	Jipang	466	
167	Penawangan	Karangpaing	280	
168	Penawangan	Karangwader	345	
169	Penawangan	Kluwan	571	
170	Penawangan	Kramat	511	
171	Penawangan	Lajer	1,601	
172	Penawangan	Leyangan	448	
173	Penawangan	Ngeluk	416	
174	Penawangan	Penawangan	271	
175	Penawangan	Pengkol	450	
176	Penawangan	Pulutan	324	
177	Penawangan	Sedadi	611	
178	Penawangan	Toko	473	
179	Penawangan	Tunggu	283	
180	Penawangan	Watupawon	298	
181	Penawangan	Wedoro	272	
182	Penawangan	Winong	294	
183	Penawangan	Wolo	342	
184	Pulokulon	Jambon	1,071	15,007
185	Pulokulon	Jatiharjo	739	
186	Pulokulon	Jetaksari	792	
187	Pulokulon	Karangharjo	1,340	
188	Pulokulon	Mangunrejo	1,128	
189	Pulokulon	Mlowokarangtalun	1,060	
190	Pulokulon	Panunggalan	1,327	
191	Pulokulon	Po jok	1,382	
192	Pulokulon	Pulokulon	1,360	
193	Pulokulon	Randurejo	725	
194	Pulokulon	Sembungharjo	1,094	
195	Pulokulon	Sidorejo	1,752	
196	Pulokulon	Tuko	1,237	
197	Purwodadi	Candisari	243	1,730
198	Purwodadi	Cingkrong	243	
199	Purwodadi	Danyang	24	
200	Purwodadi	Genuksuran	-	
201	Purwodadi	Kalongan	91	
202	Purwodadi	Kandangan	38	
203	Purwodadi	Ka ranganyar	55	
204	Purwodadi	Kedungrejo	390	
205	Purwodadi	Kuripan	99	
206	Purwodadi	Nambuhan	17	
207	Purwodadi	Ngembak	66	
208	Purwodadi	Nglobar	38	
209	Purwodadi	Ngraji	31	
210	Purwodadi	Pulorejo	145	
211	Purwodadi	Purwodadi	100	
212	Purwodadi	Putat	44	
213	Purwodadi	Warukaranganyar	106	
214	Tanggungharjo	Brabo	589	5,177
215	Tanggungharjo	Kaliwenang	419	
216	Tanggungharjo	Kapung	308	
217	Tanggungharjo	Mrisi	472	
218	Tanggungharjo	Ngambakrejo	545	
219	Tanggungharjo	Padang	662	

220	Tanggungharjo	Ringinpitu	654	6,089
221	Tanggungharjo	Sugihmanik	803	
222	Tanggungharjo	Tanggungharjo	725	
223	Tawangharjo	Godan	701	
224	Tawangharjo	Jono	604	
225	Tawangharjo	Kemaduhbatur	498	
226	Tawangharjo	Mayahan	638	
227	Tawangharjo	Plosorejo	573	
228	Tawangharjo	Pojok	726	
229	Tawangharjo	Pulongrambe	491	
230	Tawangharjo	Selo	826	
231	Tawangharjo	Tarub	578	
232	Tawangharjo	Tawangharjo	454	
233	Tegowanu	Cangkring	257	6,200
234	Tegowanu	Curug	225	
235	Tegowanu	Gaji	219	
236	Tegowanu	Gebangan	160	
237	Tegowanu	Karangpasar	327	
238	Tegowanu	Kebonagung	673	
239	Tegowanu	Kedungwungu	489	
240	Tegowanu	Kejawan	181	
241	Tegowanu	Mangunsari	345	
242	Tegowanu	Medani	231	
243	Tegowanu	Pepe	342	
244	Tegowanu	Sukorejo	300	
245	Tegowanu	Tajemsari	383	
246	Tegowanu	Tanggirejo	232	
247	Tegowanu	Tegowanukulon	500	
248	Tegowanu	Tegowanuwetan	381	
249	Tegowanu	Tlogorejo	452	
250	Tegowanu	Tunjungharjo	503	
251	Toroh	Bandungharjo	535	5,035
252	Toroh	Boloh	254	
253	Toroh	Depok	-	
254	Toroh	Dimoro	681	
255	Toroh	Genengadal	40	
256	Toroh	Genengsari	95	
257	Toroh	Katong	327	
258	Toroh	Kenteng	816	
259	Toroh	Krangganharjo	-	
260	Toroh	Ngrandah	82	
261	Toroh	Pilangpayung	644	
262	Toroh	Plosoharjo	368	
263	Toroh	Sindurejo	297	
264	Toroh	Sugihan	474	
265	Toroh	Tambirejo	251	
266	Toroh	Tunggak	171	
267	Wirosari	Dapurno	701	10,886
268	Wirosari	Dokoro	1,060	
269	Wirosari	Gedangan	685	
270	Wirosari	Kalirejo	522	
271	Wirosari	Karangasem	699	
272	Wirosari	Kropak	510	
273	Wirosari	Kunden	669	
274	Wirosari	Mojorebo	802	
275	Wirosari	Sambirejo	422	

276	Wirosari	Tambahrejo	841
277	Wirosari	Tambakselo	1,577
278	Wirosari	Tanjungrejo	775
279	Wirosari	Tegalrejo	1,398
280	Wirosari	Wirosari	225
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>142,998</b>

Purwodadi, 20 Januari 2025  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan



**Endang Sulistyoningsih, S.T., M.T**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730726 199803 2 006

**REKAP REALISASI ASET TANAH PEMKAB YANG TELAH BERSERTIPIKAT (PSU DAN NON PSU)  
SAMPAI DENGAN 05 NOVEMBER 2024  
DISPERAKIM**

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
1	Jalan di Perumahan Gubug Permai	67	Desa Gubug, Kecamatan Gubug	Hak Pakai	26 Mei 2023	HP. 00056	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
2	Jalan di Perumahan Gubug Permai	536	Desa Gubug, Kecamatan Gubug	Hak Pakai	26 Mei 2023	HP. 00057	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
3	Jalan di Perumahan Gubug Permai	1,941	Desa Gubug, Kecamatan Gubug	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00058	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
4	Mushola di Perumahan Gubug Permai	77	Desa Gubug, Kecamatan Gubug	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00060	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
5	Jalan di Perumahan Gubug Permai	569	Desa Gubug, Kecamatan Gubug	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00061	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
6	Balai Pertemuan di Perumahan Petra Griya Indah	217	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00376	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
7	Lapangan di Perumahan Petra Griya Indah	239	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00377	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
8	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	980	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00378	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
9	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	282	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00379	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
10	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	176	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00380	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
11	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	707	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00381	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
12	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	734	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00382	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
13	Masjid di Perumahan Ayodya Bersemi II	380	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00016	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
14	Taman di Perumahan Ayodya Bersemi II	173	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00017	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
15	Lapangan di Perumahan Ayodya Bersemi II	876	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00018	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
16	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	383	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00019	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
17	Taman di Perumahan Ayodya Bersemi II	14	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00020	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
18	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	328	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00021	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
19	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	416	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00022	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	<b>PENYELESAIAN TAHUN 2022 (TERBIT 59 BIDANG)</b>
20	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	488	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00023	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
21	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	361	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	19 Juni 2023	HP. 00024	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
22	Taman di Perumahan Ayodya Bersemi II	66	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00025	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
23	Pos Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	527	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00026	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
24	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	1,282	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00027	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
25	Taman di Perumahan Ayodya Bersemi II	55	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00028	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
26	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	796	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00029	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
27	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	696	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00030	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
28	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	890	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00031	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
29	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	207	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00032	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
30	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	616	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00033	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
31	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	877	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00034	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
32	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	391	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00035	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
33	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	366	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00036	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
34	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	663	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00037	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
35	Pos Satpam di Perumahan Ayodya Bersemi II	16	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00038	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
36	Pos Taman di Perumahan Ayodya Bersemi II	12	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00039	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
37	Pos Taman di Perumahan Ayodya Bersemi II	25	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00040	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
38	Jalan di Perumahan Ayodya Bersemi II	464	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00041	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
39	Taman di Perumahan Gubug Permai	129	Desa Gubug, Kecamatan Gubug	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00059	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
40	Jalan di Perumahan Griya Wijaya Sartika	133	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00060	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
41	Mushola di Perumahan Griya Wijaya Sartika	241	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00061	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
42	Jalan di Perumahan Griya Wijaya Sartika	898	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00062	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
43	Taman di Perumahan Griya Wijaya Sartika	8	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00063	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
44	Jalan di Perumahan Griya Wijaya Sartika	956	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	22 Juni 2023	HP. 00064	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
45	Lahan Parkir di Perumahan Petra Griya Indah	73	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	10 Juli 2023	HP. 00387	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
46	Taman di Perumahan Petra Griya Indah	37	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	10 Juli 2023	HP. 00388	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
47	Pos Kamling di Perumahan Petra Griya Indah	36	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	10 Juli 2023	HP. 00389	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
48	Taman di Perumahan Petra Griya Indah	46	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	10 Juli 2023	HP. 00390	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
49	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	363	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00383	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
50	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	458	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00384	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
51	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	417	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00385	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
52	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	188	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00386	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
53	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	539	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00391	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
54	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	367	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00392	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
55	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	361	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00393	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
56	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	115	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Juli 2023	HP. 00394	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
57	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	456	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	12 Juli 2023	HP. 00365	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
58	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	110	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	12 Juli 2023	HP. 00366	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
59	Jalan di Perumahan Petra Griya Indah	537	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	12 Juli 2023	HP. 00367	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
60	Perluasan Pasar Glendoh	21,124	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	28 Juli 2023	HP. 00369	Aset Tanah Pemkab	
61	Balai Benih Ikan Kolam Air Tawar Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan	2,894	Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan	Hak Pakai	18 Agustus 2023	HP. 00073	Aset Tanah Pemkab	
62	Balai Benih Ikan Kolam Air Tawar Desa Karangasem Kecamatan Wirosari	13,630	Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	18 Agustus 2023	HP. 00085	Aset Tanah Pemkab	
63	Sekolah Dasar Negeri 6 Wirosari Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari	1,671	Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	18 Agustus 2023	HP. 00163	Aset Tanah Pemkab	
64	Gedung eks BLK Nglejok Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi	1,306	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	18 Agustus 2023	HP. 00370	Aset Tanah Pemkab	
65	Perluasan SMPN 1 Gabus	3,573	Desa Tahunan, Kecamatan Gabus	Hak Pakai	12 September 2023	HP. Elektronik NIB. 11.10.000000004.0	Aset Tanah Pemkab	
66	Taman di Perumahan RSS. Sambak Indah	511	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	12 September 2023	HP. Elektronik NIB. 11.10.000000005.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
67	Pos Kamling di Perumahan RSS. Sambak Indah	69	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00284	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
68	Lapangan di Perumahan RSS. Sambak Indah	398	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00285	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
69	Lapangan di Perumahan RSS. Sambak Indah	506	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00286	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
70	Taman di Perumahan RSS. Sambak Indah	708	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00287	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
71	Taman di Perumahan RSS. Sambak Indah	115	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00288	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
72	Pos Kamling di Perumahan RSS. Sambak Indah	40	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00289	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
73	Taman di Perumahan RSS. Sambak Indah	610	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00290	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
74	Jalan di Perumahan RSS. Sambak Indah	102	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00291	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
75	Kolam di Perumahan RSS. Sambak Indah	497	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00292	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
76	Pos Kamling di Perumahan RSS. Sambak Indah	49	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00293	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
77	Taman di Perumahan RSS. Sambak Indah	250	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00294	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	

**TARGET  
PENSERTIPIKATAN  
TAHUN 2023**

**TAHAP 1  
(TERBIT 30 BIDANG)**

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
78	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Grobogan (Bekas SDN 3 Danyang)	2,752	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00295	Aset Tanah Pemkab	
79	Lapangan di Perumahan RSS. Sambak Indah	350	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00296	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
80	Jalan di Perumahan Griya Sambak Regency	245	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00297	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
81	Jalan di Perumahan Griya Sambak Regency	254	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00298	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
82	Taman di Perumahan RSS. Sambak Indah	487	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00299	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
83	Pos Kamling di Perumahan RSS. Sambak Indah	29	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00300	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
84	Lapangan di Perumahan RSS. Sambak Indah	461	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00301	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
85	Taman di Perumahan Bumi Kalongan Indah	29	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00310	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
86	Taman Bermain di Perumahan Bumi Kalongan Indah	95	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00311	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
87	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	76	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00312	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
88	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	407	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00313	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
89	Taman Cerdas Anak	1,026	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	11 Oktober 2023	HP. 00395	Aset Tanah Pemkab	
90	Jalan di Perumahan Widya Sartika Godong	90	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00066	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
91	Jalan di Perumahan Widya Sartika Godong	82	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00068	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
92	Jalan di Perumahan Widya Sartika Godong	1,058	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00067	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
93	Jalan di Perumahan Widya Sartika Godong	566	Desa Godong, Kecamatan Godong	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00065	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
94	Masjid di Perumahan Bumi Kalongan Indah	516	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00282	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
95	Gudang di Perumahan Bumi Kalongan Indah	71	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00285	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
96	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	698	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00284	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
97	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	806	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00286	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
98	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	873	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00288	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	<p style="text-align: center;"><b>TARGET PENSERTIPIKATAN TAHUN 2023</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TAHAP 2 (TERBIT 28 BIDANG)</b></p>
99	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	718	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00283	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
100	Jalan di Perumahan Bumi Kalongan Indah	299	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00287	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
101	Jalan di Perumahan Kepoh Persada Indah	25	Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00033	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
102	Jalan di Perumahan Kepoh Persada Indah	210	Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00032	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
103	Jalan di Perumahan Grobogan Permai	222	Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00081	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
104	Jalan di Perumahan Grobogan Permai	62	Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00082	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
105	Jalan di Perumahan Alamanda	257	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00314	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
106	Jalan di Perumahan Grand Semesta	510	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00397	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
107	Jalan di Perumahan Grand Semesta	69	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00396	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
108	Jalan di Perumahan Grand Master	103	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00373	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
109	Jalan di Perumahan Grand Master	209	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00372	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
110	Jalan di Perumahan Semesta Mulia	147	Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00017	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
111	Jalan di Perumahan Semesta Mulia	103	Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00015	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
112	Jalan di Perumahan Semesta Mulia	438	Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh	Hak Pakai	20 Desember 2023	HP. 00016	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
113	Jalan di Perumahan Pesona Gajah Mada	370	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00371	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
114	Asset Tanah Desa Tahunan (Untuk Pertanian)	2,135	Desa Tahunan, Kecamatan Gabus	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00014	Aset Tanah Pemkab	
115	Asset Tanah Desa Tahunan (Untuk Pertanian)	1,513	Desa Tahunan, Kecamatan Gabus	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00015	Aset Tanah Pemkab	
116	Asset Tanah Desa Tahunan (Untuk Pertanian)	863	Desa Tahunan, Kecamatan Gabus	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP.00016	Aset Tanah Pemkab	
117	Asset Tanah Kelurahan Wirosari (Untuk TK)	316	Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	22 Desember 2023	HP. 00164	Aset Tanah Pemkab	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
118	Perumahan Ganessa Regency	35	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000026.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	<p style="text-align: center;"><b>TARGET PENSERTIPIKATAN TAHUN 2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(TERBIT 22 BIDANG) per 14 Agustus 2024</b></p>
119	Perumahan Griya Semesta	367	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000022.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
120	Perumahan Griya Semesta	104	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000023.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
121	Perumahan Griya Semesta	284	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000024.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
122	Perumahan Griya Semesta	343	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000025.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
123	Perumahan Cahaya Griya Mandiri	82	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000017.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
124	Perumahan Cahaya Griya Mandiri	980	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000016.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
125	Perumahan Cahaya Griya Mandiri	93	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000018.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
126	Perumahan Grand Mutiara Nglejok	54	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000014.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
127	Perumahan Grand Mutiara Nglejok	59	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000013.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
128	Perumahan Grand Mutiara Nglejok	1,645	Desa Putat, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000015.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
129	Perumahan Griya Mutiara Jetis	276	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000029.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
130	Perumahan Griya Mutiara Jetis	16	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000027.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
131	Perumahan Griya Mutiara Jetis	16	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000028.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
132	Perumahan MH. Thamrin	564	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000021.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
133	Perumahan Mekar Wangi Residence	410	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000019.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
134	Perumahan Mekar Wangi Residence	185	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000020.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
135	Perumahan Yakkum (Graha Petridian Asri)	434	Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000011.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
136	Perumahan Yakkum (Graha Petridian Asri)	209	Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	07 Mei 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000012.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
137	Makam Umum Banyuono	14,000	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	03 Juli 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000033.0	Aset Tanah Pemkab	
138	Makam Kristen Banyuono	3,938	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	03 Juli 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000031.0	Aset Tanah Pemkab	
139	Jalan Makam Banyuono	413	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	03 Juli 2024	HP. Elektronik NIB 11.10.000000032.0	Aset Tanah Pemkab	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
140	Jalan Siswomiharjo	3,162	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	03 September 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000000034.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	<p style="text-align: center;"><b>TARGET PENSERTIPIKATAN TAHUN 2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(TERBIT 14 BIDANG) per 05 November 2024</b></p>
141	Jalan DI Panjaitan	4,620	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	03 September 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000000035.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
142	Jalan Untung Suropati	3,702	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	23 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000005851.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
143	Jalan Untung Suropati II	11,010	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	23 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000005852.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
144	Jalan Semen Grobogan	16,380	Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo	Hak Pakai	24 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000005853.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
145	TK Darul Muttaqin	302	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	23 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000005854.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
146	Masjid Darul Muttaqin	734	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	23 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000005855.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
147	Makam RSS	1,896	Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	23 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000005856.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
148	Perumahan Cluster Taman Asteria	409	Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	28 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007601.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
149	Terminal Wirosari	2,209	Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	24 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007602.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
150	Asset Tanah Kelurahan Wirosari	2,009	Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	28 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007604.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
151	Perumahan Grand Semesta	177	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	24 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007605.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
152	Perumahan Griya Gading Asri	321	Desa Depok, Kecamatan Toroh	Hak Pakai	28 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007606.0	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	
153	Jalan Untung Suropati I	900	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	24 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007652.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
154	Asset Tanah Kelurahan Wirosari	387	Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	24 Oktober 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000007603.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	<p style="text-align: center;"><b>TARGET PENSERTIPIKATAN TAHUN 2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(TERBIT 4 BIDANG) per 18 November 2024</b></p>
155	TPS3R	667	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	18 November 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000009536.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	
156	TPS3R	231	Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi	Hak Pakai	18 November 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000009537.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	

NO	PENGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>	ALAMAT	HAK TANAH	TANGGAL SERTIPIKAT	NOMOR SERTIPIKAT	BIDANG	KETERANGAN
157	Asset Tanah Kelurahan Wirosari	119	Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari	Hak Pakai	18 November 2024	HP. Elektronik NIB. 11.10.000009539.0	Aset Tanah Pemkab (Non PSU)	

**TOTAL LUAS : 165,696 M2**

Purwodadi, 20 Januari 2025  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan



**Endang Sulistyoningsih, S.T., M.T**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730726 199803 2 006

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

Jl. Dr. Sutomo No.10, Purwodadi – Grobogan , 58111  
Telp. (0292) 5140756 Fax (0292) 422012

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 050/528.1/2021**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

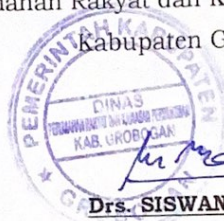
Ditetapkan di PURWODADI

Pada tanggal

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan



**Drs. SISWANTO, MM**

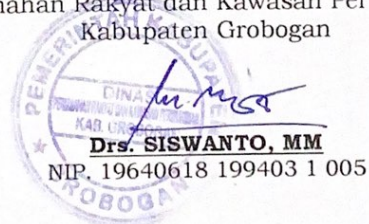
NIP. 19640618 199403 1 005

Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan  
Nomor  
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Grobogan

---

1. Nama Unit Organisasi : Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pemerintah Yang Dilaksanakan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
  - e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan

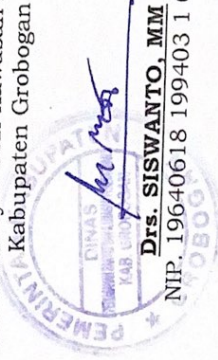


**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni  Persentase kawasan kumuh	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100  Luas kawasan kumuh (SK Bupati) dibagi luas wilayah dikali 100	%  %	62,54	62,88	63,16	63,44	63,72	64,00	64,28
2.	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota  Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali 100  Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolali di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolali di IPALD dibagi jumlah rumah di Kabupaten/ Kota dikali 100	%  %	0,068 (SK Lama)	0,057 (SK Baru)	0,054	0,050	0,047	0,043	0,040
					84,40	85,30	86,20	87,10	88,00	88,90	89,80
					76,54	75,56	78,57	78,59	78,60	78,62	78,63

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						
					Kondisi Awal		2022				2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan ke Pemda yang disertifikatkan	Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan dibagi jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemerintah Daerah dikali 100	%	0	0	0	23,08	46,15	76,92	100
4.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan & kualitas pelayanan publik didukung dgn manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yg baik	Skor nilai SKM	Score Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey	Score	76,67	76,67	78	79	80	81	82

Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan



**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2024**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

**Jl. Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi – grobogan , 58111**

**Telp (0292)5140756 Fax (0292) 422012**

**Email : [dperakim.grobogan@gmail.com](mailto:dperakim.grobogan@gmail.com)**

**Website : [disperakim.grobogan.go.id](http://disperakim.grobogan.go.id)**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SISWANTO, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M  
Jabatan : Bupati Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2024

Pihak Kedua,  
  
SRI SUMARNI, S.H, M.M

Pihak Pertama,  
  
Drs. SISWANTO, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640618 199403 1 005


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63,73%	63,73%
		Persentase kawasan kumuh	0%	0,047%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	87,93%	87,93%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,76%	78,60%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	52,50%	52,50%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78,9	80 Skor

	Program	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Rp 9.326.991.000	Rp6.601.390.000	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.896.439.000	Rp12.479.788.368	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.217.906.000	Rp5.300.677.182	
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp 25.000.000	Rp30.000.000	
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 11.694.000.000	Rp6.445.000.000	

6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 15.846.239.000	Rp8.616.540.450	
7	Program Penatagunaan Tanah	Rp0	Rp1.500.000.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp52.006.575.000</b>	<b>Rp40.973.396.000</b>	

BUPATI GROBOGAN,



*[Signature]*  
SRI SUMARNI, S.H, M.M

Purwodadi, Januari 2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



*[Signature]*  
Drs. SISWANTO, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640618 199403 1 005